



RENSTRA **2025 - 2029**

DOKUMEN

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

KEC MUARA MUNTAI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA MUNTAI

Jalan R.A. Kartini No.1 Kec Muara Muntai

Email : mmcamatoffice@yahoo.com

Kode Pos : 75562



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Muntai ini berpedoman kepada Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan Muara Muntai pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Samboja ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai di Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara didalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Aamiin.

Muara Muntai, 07 Januari 2025

Camat Muara Muntai,

H. MULYADI, SE.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700205 200012 1 003



DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II	Gambaran Pelayanan Kecamatan Muara Muntai
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kec Muara Muntai
2.2.	Sumber Daya
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tusi Kec Muara Muntai
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.	Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA
3.4.	Telaahan Rencana Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Muara Muntai
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
BAB VII	Penutup
	Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Muara Muntai merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai potensi sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, perikanan dan kehutanan, serta keanekaragaman hayati yang tinggi, Muara Muntai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat memberikan peluang dan tantangan baru yang memerlukan perencanaan strategis untuk menghadapi dinamika pembangunan pada periode 2025-2029.

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Muara Muntai akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.



Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, Kegiatan, dan Sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: Persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Muara Muntai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samboja ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;



13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan Kecamatan Muara Muntai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik good governance dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Muara Muntai;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Muara Muntai;
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Muara Muntai untuk periode 5 (lima) tahun kedepan;
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran;
5. Menyediakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja target, dan pagu indikatif;
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Muara Muntai.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB 1 Pendahuluan



- Menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Muara Muntai.
2. BAB 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- Membahas tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai ini untuk memaksimalkan pelayanan dan mendukung pembangunan yang merata serta berkelanjutan.
3. BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
 - Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
4. BAB 4 Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
 - Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya;
 - Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030



merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030;

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi;
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK);
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030

5. BAB 5 Penutup

- Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Muara Muntai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokoknya dimana melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapaun Tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan; pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;



12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan.

b. Camat mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - 4.1 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 - 4.2 Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
 - 4.3 Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - 4.4 Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - 4.5 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Dalam hal ini juga perangkat kecamatan mempunyai Tata Kerja meliputi :

Tata Kerja Camat :

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;
- b. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;



- c. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
- h. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayananm (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
- j. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginvetarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategi serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan; dan



- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Sekretaris Kecamatan :

- a. Memimpin, memimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi; dan
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKJIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD dan LKPD;
- h. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar



- (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa;
 - k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat; dan
 - l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LkjIP dan LPPD melaporkan ke Camat melalui Sekretaris;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;



- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan



- perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
- e. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (BWS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
 - f. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
 - g. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG. KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sanksi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, ketatalaksanaan dan Kepegawaian;



- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian; dan
- k. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Pemerintahan :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;
- d. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- e. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
- g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
- h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;
- i. Merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta



- penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
- j. Merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
 - k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
 - l. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan; dan
 - n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Pelayanan Umum :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
- c. Merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
- d. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
- e. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang



- perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
 - g. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
 - h. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
 - i. Merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
 - j. Merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
 - k. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
 - l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
 - n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan Kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian,



- pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- d. Merencanakan Kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
 - e. Merencanakan Kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
 - f. Merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan, merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
 - g. Merencanakan Kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;
 - h. Merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
 - i. Merencanakan Kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
 - j. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - k. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat desa; dan
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.



Tata Kerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. Merencanakan kegiatan, dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. Merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
- h. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- i. Merencanakan kegiatan, melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;



- j. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyipan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- l. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. Merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. Merencanakan kegiatan melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap



- penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
- g. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
 - h. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
 - i. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
 - j. Merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
 - k. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kesejahteraan Sosial;
 - l. Merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
 - m. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kesejahteraan Sosial; dan
 - n. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka struktur organisasi Kecamatan Muara Muntai terdiri dari :

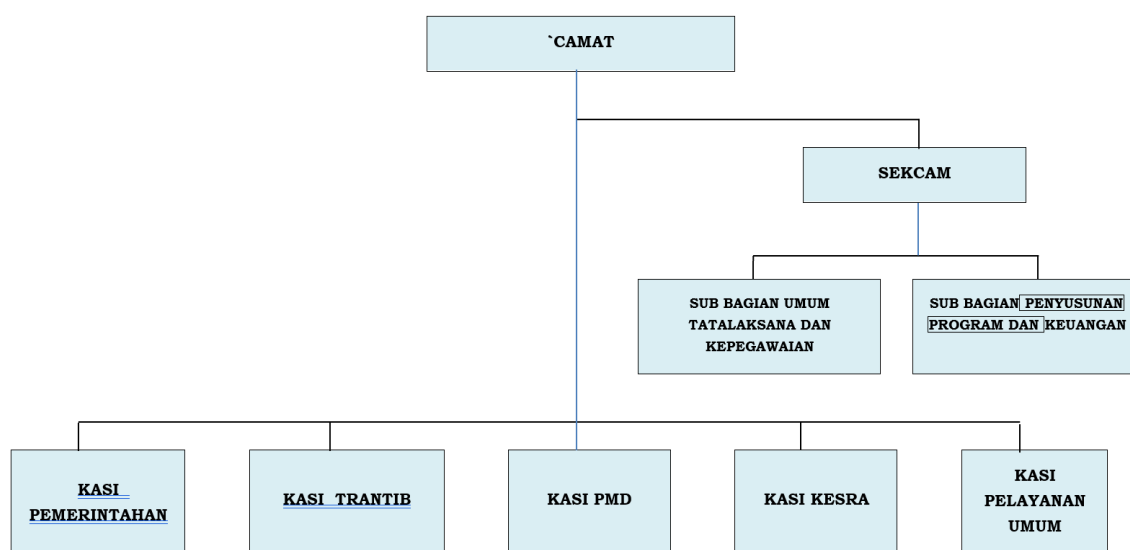
- 1. Camat ;
- 2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



3. Seksi-seksi yang terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan
- Seksi pelayanan Publik
- Seksi Pemperryaan Masyarakat
- Seksi Ketremtraman dan ketertiban
- Seksi Kesejahteraan Sosial

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Muara Muntai dapat dilihat struktur organisasi seperti Gambar 1 di bawah ini;



2.2. Sumber Daya

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja

Untuk gambaran umum Kecamatan Muara Muntai dibawah ini akan dikemukakan mulai dari ; Letak Wilayah dan Batas Wilayah serta kependudukan, sosial budaya dan gambaran lainya yaitu, sebagai berikut;

1. Letak Wilayah

Kecamatan Muara Muntai terletak pada 116 derajat 11 menit sampai dengan 116 derajat 39 menit bujur timur dan 00 derajat 17 menit sampai dengan 00 derajat 41 menit lintang utara. Ketinggian struktur tanah dari permukaan laut yakni 0 meter sampai dengan 535 meter. Struktur wilayah tidak merata pada setiap desa yakni dengan keadaan wilayah terdiri dari lahan daratan yang agak tinggi,



aliran bantaran sungai mahakam dan danau. Luas wilayah seluruhnya berjumlah 928,6 Km², yang dibagi dalam wilayah pedesaan dengan jumlah desa ada 13 (tiga belas) desa yakni ;

- a. Desa Perian
- b. Desa Muara Leka
- c. Desa Muara aloh
- d. Desa Jantur
- e. Desa Kayu Batu
- f. Desa Muara Muntai Ilir
- g. Desa Muara Muntai Ulu
- h. Desa Rebaq Rinding
- i. Desa Batuq
- j. Desa Jantur Selatan
- k. Desa Tanjung Batuq Harapan
- l. Desa Pulau Harapan
- m. Desa Jantur Baru

Kemudian diantara 13 desa tersebut masih ada 3 (tiga) Sub Desa yakni ;

- a. Sub Desa Muara Leka I Desa Muara Leka
- b. Sub Desa Desa Muara Leka II Desa Muara Leka
- c. Sub Desa Puandana Desa Kayu Batu

Suhu rata-rata antara 28 derajat sampai dengan 34 derajat.

Tentang letak ibukota Kecamatan Muara Muntai berada pada bantaran Sungai Mahakam yang diapit oleh dua danau besar, yakni ;

- a. Disebelah Timur barat daya danau melintang
- b. Disebelah barat dengan danau tempatung/jempang

Mengenai batas administrasi kecamatan lainnya yaitu sebagai berikut ;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bongan dan Jempang Kabupaten Kutai Barat
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Kota bangun dan Loa Kulu Kabupaten Kutai kartanegara

d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat;

Bila dilihat keadaanya maka wilayah kecamatan Muara Muntai lebih banyak daerah rendahnya yang mana jika terjadi banjir maka dataran rendah ini tergenang oleh air akibat banjir, jika dibandingkan daratan yang tidak digenangi air ketika banjir sekitar 30% saja, selebihnya kawasan wilayah Muara Muntai termasuk ibu Kotanya terendam oleh air ketika banjir melanda sehingga jalan yang ada dibuat dari bahan kayu besi atau kayu ulin dan disebut jalan jembatan, dengan ketinggian air antara 0,5 sampai 3,3 M.



Peta Wilayah Kecamatan Muara Muntai

2. Kependudukan, Mata Pencapaian Masyarakat serta sarana dan prasarana Keadaan penduduk Januari 2024 dan mata pencapaian masyarakat sebagai berikut ;



No	Desa	Januari 2024			Ket
		L	P	JML	
1	Perian	1.066	991	2.057	
2	Muara Leka	882	793	675	
3	Muara Aloh	617	515	1.132	
4	Jantur	1.077	956	2.033	
5	Batuq	358	304	662	
6	Rebaq Rinding	486	459	945	
7	Ma. Muntai Ilir	676	705	1.381	
8	Ma. Muntai Ulu	1.059	1.097	2.156	
9	Kayu Batu	690	645	1.335	
10	Jantur Selatan	1.167	1.095	2.262	
11	Tjg. Batuq Harapan	247	232	479	
12	Pulau Harapan	956	905	1.861	
13	Jantur Baru	648	586	1.234	
	Jumlah			12.212	

Dari jumlah penduduk tersebut bila dilihat dari mata pencaharian secara umum yakni ;

- | | | |
|------------------------|-------------|--------|
| a. Tani | Jumlah 5204 | = 30 % |
| b. Nelayan | Jumlah 6072 | = 35 % |
| c. Dagang | Jumlah 2949 | = 17 % |
| d. PNS/TNI/Polri/Honor | Jumlah 521 | = 3 % |
| e. Lain-lain | Jumlah 2602 | = 15 % |

Dengan kepadatan penduduk rata-rata 20 jiwa per Km²,
Keadaan suku yang berdomisili di Kecamatan Muara Muntai terdiri dari suku Kutai, Suku Banjar, Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Dayak, Suku Madura dll, yang hidup dalam satu lingkungan yang membaur dan berkelompok, Bahasa sehari-hari yang digunakan sebagai alat komunikasi menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama namu sering juga didengar, bahasa kutai, bahasa banjar, bahas bugis dan bahas jawa. Sedangkan pada rumah-rumah penduduk masih didengar bahasa masing-masing untuk komunikasi mereka dalam keluarga.

Prasarana dan sarana yang ada di kecamatan Muara Muntai meliputi;



a. Rumah Ibadah

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Mesjid/Langgar | 40 Buah |
| 2. Gereja | 5 Buah |
| 3. Pura | - Buah |
| 4. Wihara | - Buah |

b. Lembaga Pendidikan

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. TK/Kelompok Bermain | 13 Buah |
| 2. SD/MI | 17 Buah |
| 3. SMP/MTS | 6 Buah |
| 4. SMA/SMK/MA | 4 Buah |

c. Lembaga Kesehatan

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Puskesmas | 1 Buah |
| 2. Pusban/Polendes | 4 Buah |

d. Sarana Transportasi

Untuk ini perlu diketahui terlebih dahulu jarak antara kecamatan Muara Muntai dengan ibu Kota Kabupaten $\pm$ 137 Km, jarak antara Muara Muntai dengan ibu Kota Propinsi $\pm$ 175 Km, untuk itu dapat ditempuh dengan jalur darat dan jalur sungai danau dengan menggunakan transportasi ;

1. Jalan, terdiri dari ;

- | | |
|--------------------------|-------|
| a. Jalan Propinsi | 11 Km |
| b. Jalan Kabupaten | 97 Km |
| c. Jalan Desa/Lingkungan | 43 Km |

2. Sungai/ Danau

Dengan menggunakan kapal motor, Long board, ces/ketinting dan perahu tradisional.

Selanjutnya akan diberikan gambaran pula mengenai potensi wilayah secara umum. Melihat kepada keadaan wilayah dengan tipologi yang tidak merata, akan dapat digali potensi yang sangat beragam dan menguntungkan bila dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Kecamatan Muara Muntai memiliki 3 (tiga) ciri secara



kewilayahan yakni, daratan, sungai dan danau dan masing-masing memiliki kelebihan/potensinya, dibawah ini akan diuraikan secara informatif dan konseptual masing-masing potensi itu ssb ;

1. Daratan

Pada wilayah Kecamatan Muara Muntai jumlah daratan yang tidak digenangi oleh air sekalipun dalam keadaan banjir mencapai ± 30 persen, yakni pada Desa Perian, Desa Muara Leka dan Sub Desa Puandana Desa Kayu Batu, pada wilayah daratan ini maka potensi yang dapat dikembangkan masing-masing.

2. Perkebunan

Perkebunan yang dapat dikembangkan yakni perkebunan kecil (perkebunan rakyat), seperti jenis buah-buahan; Durian, Duku/Langsar, Rambutan dll, bahkan perkebunan rotan dan perkebunan besar (yang menggunakan teknologi) dan ini sudah dilaksanakan dalam wilayah tiga desa, yakni perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan PT. Jaya Mandiri Sukses, dalam bentuk inti dan plasma.

Selanjutnya masih dimungkinkan untuk perkebunan **Jarak/Jatak Pagar, Karet dan Aren**. Untuk ini bila ada pengembangan perkebunan yang ingin benar-benar bermitra dengan masyarakat masih dimungkinkan untuk pengembangannya, dengan catatan hasilnya dibeli kembali oleh pengembang selaku penanam modal dimaksud, termasuk dalam **wilayah eks batu bara**, dengan sasaran reklamasi atau penghijauan kembali bekas galian yang mereka tinggalkan.

3. Pertanian dengan Sistem Irigasi

Pertanian dengan sistem irigasi sebenarnya masih memungkinkan untuk dikembangkan pada sebagian wilayah desa perian dan sebagian wilayah desa muara leka, yang mana



PT. JMS menggunakan lahan tidur pada wilayah yang rendah sebelah barat jalan trans kalimantan sedangkan daratan rendah yang ada sebelah timur trans kalimantan (istilah masyarakat perian dan Ma. Leka Kiri/Kanan jalan) merupakan daratan rendah yang tidak tergenangi banjir dapat dibentuk irigasi yang memungkinkan tanaman pada menjadi tumbuh subur bila dikelola dengan cara irigasi.

4. Tambang

Untuk tambang pada ketiga desa ini mengandung Batu bara yang berkadar tinggi, dan memang telah ada perusahaan tambang batu bara yang beroperasi disini yakni PT. KCB anak cabang PT. KSM namun masih banyak wilayah lagi yang memungkinkan untuk itu, dan dalam kesempatan terakhir ini mereka dapat memberikan combev kepada masyarakat desa perian dalam jumlah yang cukup besar.

Selanjutnya masih ada beberapa perusahaan lagi yang ingin menanamkan sahamnya di wilayah ini namun masih dalam tarap penjajakan dan belum beroperasi dan masih mengurus ijin pertambangan dsb dan hingga renstra ini dibuat masih belum melakukan oprasi pertambangan.

5. Galian Batu Padas

Potensi lain yang dapat dikembangkan yakni jenis galian C yakni penggalian batu padas, beberapa gunung yang batu gunungnya cukup kuat dan memungkinkan untuk dijadikan standar untuk digunakan sebagai batu pengerasan jalan raya.

6. Daratan rendah dibantaran Mahakam

Pada dataran rendah sekitar bantaran mahakam dapat digali pula potensinya, antara lain untuk penanaman padi musiman,



perkebunan semangka, jagung, timun, labu. Karena bila air telah kembali normal setelah banjir maka bantaran mahakam ini sangat subur, sehingga tidak diperlukan pupuk sedikitpun, namun ini sifatnya, musiman bila dalam pengertian masyarakat secermat mungkin memperhitungkan air.

Disamping itu dapat pula dikembangkan potensi ikan air tawar dengan sistem keramba. Sistem pemeliharaan ikan air tawar yang dapat hidup dengan mudah dan biasanya makananyapun dapat diberikan makanan pengganti seperti rumput dll yakni ikan jelawat, ikan mas dan ikan mujair. Kemudian yang harganya sangat tinggi yakni ikan betutu, dan ikan ini dapat hidup baik dalam keramba maupun kolam. Untuk jenis ikan ini harganya bisa mencapai (Rp. 100.000) ratusan ribu rupiah perkilogramnya bahkan lebih dari itu pada waktu-waktu tertentu.

7. Danau yang luas

Danau yang luas yang ada di sekitar Kecamatan Muara Muntai memungkinkan digali potensinya pada bidang pertanian dan perikanan, antara lain ;

1. **Padi Danau**, yang mana hampir setiap tahunnya saat kemarau masyarakat dapat dengan mudah menanam padi dipinggiran danau yang sudah pasti tidak memerlukan tenaga yang banyak (tidak terlalu membuang tenaga) karena rumputnya sudah membusuk saat air banjir dan keadaan tanahnya sangat subur.
2. **Potensi ikan tangkap**. Yakni nelayan tinggal menangkap ikan yang ada tersedia di danau, namun perlu disadari pula oleh mereka agar tidak menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem alam dan perikanan.
3. **Potensi ikan keramba**, untuk hal ini tidak terlalu jauh berbeda dengan keramba pada bantaran mahakam.

Selanjutnya sejak zaman penjajahan belanda dan hingga sekarang ini tidak kalah pentingnya bahwa kecamatan Muara



Muntai menguasai bidang **perdagangan** dalam semua bentuknya seperti pakaian, elektronik, peralatan rumah tangga dll, hal ini harus dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

Beberapa potensi ini yang hingga kini sekarang perlu untuk dibina. Disempurnakan, dikelola dan sebagainya demi perkembangan lebih maju lagi pada masa-masa yang akan datang. Untuk menunjang ini semua seharusnya transportasi jalan merupakan kebutuhan utama dan diprioritaskan , karena hingga saat ini masih baru ada badan jalan dan masih belun diaspal/belum disemen.

Selanjutnya bila dilihat secara keseluruhan mengenai keadaan prasarana dan sarana perkantoran yang merupakan tempat menggeliatnya administrasi dan roda pemerintahan kurang menunjang dikarenakan berada dalam wilayah dataran rendah dan dibantaran sungai mahakam yang diapit oleh danau besar, mengakibatkan hampir setiap tahunnya mengalami gangguan dan kegiatan administrasi perkantoran terpaksa terganggu oleh genangan air (banjir), hal ini bisa berlangsung dirata-ratakan setiap tahunnya 15 sampai dengan 17 hari dan sudah dapat dipastikan roda administrasi kecamatan otomatis terganggu.

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka jumlah keseluruhan sumber daya manusia / aparatur Kantor Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara sampai bulan 30 Nopember 2024 adalah berjumlah 56 orang dengan perincian Pejabat Struktural 9 orang, Staf 30 orang, dengan jumlah PNS 39 orang, THL 16 orang, Perlindungan Masyarakat (Linmas) 31 orang, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Kantor Camat Muara Muntai**

No.	Pendidikan	Pangkat / Gol. Ruang				PNS/THL			Jenis Kelamin	
		IV	III	II	I	PNS	THL	Honor	L	P
1	S2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	S1	1	8	0	0	8	0	0	4	4
3	D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SLTA/SMA	0	3	19	0	19	15	0	11	8
6	SLTP	0	0	0	4	4	0	0	3	1
7	SD	0	0	0	2	2	0	0	2	2
Jumlah		0	11	19	6	33	15	0	18	14

sumber : Kantor Camat Muara Muntai, 2024

c. Aset Kecamatan Muara Muntai

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Muara Muntai dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai sebagai berikut :

C.1. Aset Tetap Tanah

Beberapa Aset Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tanah kecamatan Muara Muntai dapat kami sajikan dalam table di bawah ini :



Tabel. Daftar Aset Tetap Tanah

N0	URAIAN	JLH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	Tanah Bangunan Rumah Dinas jabatan Sekcam,
2	tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	1	Tanah Bangunan Rumah Dinas jabatan Camat
3	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	Tanah Bangunan Asrama Pelajar
4	Tanah Bangunan Perumahan lain Lain	2	Tanah Bangunan Rumah Dinas
5	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	11	Tanah Bangunan Ktr Camat,BPD,LPM,PKK
6	Tanah Bangunan Pendidikan	1	Tanah Bangunan exs SMA
7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1	Tanah Bangunan Sekolah TK
8	Tanah Bangunan Poliklinik	1	Tanah Bangunan Posyandu
9	Tanah Kampung Lain Lain	1	Tanah Bangunan Sekolah SD
10	Tanah Bangunan Perumahan lain Lain	2	Tanah Bangunan Rumah Dinas
11	Tanah Bangunan Olah raga	1	Tanah Untuk Gedung Olah Raga
12	Tanah Kosong Lainnya	2	Tanah Bangunan Ktr Koramil
13	Tanah Bangunan Industri Penggalangan	1	Polindes
14	Tanah Kebun	1	Tanah Kebun
15	Tanah Banguan Air Bersih/Air Baku	2	Tanah Banguan Air Bersih/Air Baku
16	Tanah bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	Kebun

C.2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan mesin adalah Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Aset Peralatan dan mesin kecamatan Muara Muntai dapat kami sajikan dalam table di bawah ini:



Tabel. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

N0	URAIAN	JLH	KET
1	2	3	4
1	P.C Unit	17	Baik
2	Lap Top	20	Baik
3	Personal Komputer lainnya	1	Baik
4	Monitor	1	Baik
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	Baik
6	Tenda	5	Baik
7	Air Conditioning (AC)	2	Baik
8	Sport Utility Vehicle (SUV)	2	Baik
9	Pick Up	2	Baik
10	Sepeda Motor	8	Baik
11	Scooter	7	Baik
12	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	6	Baik
13	Speed Boat / Motor Tempel	1	Baik
14	Long Boat	1	Baik
15	alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang lainnya (dst)	1	Baik
16	Mesin Pompa air PMK	1	Baik
17	Lemari Penyimpan	2	Baik
18	Lemari Besi/Metal	12	Baik
19	Lemari Kayu	4	Baik
20	Rak Besi	7	Baik
21	Filing Cabinet Besi	13	Baik
22	Lemari Kaca	1	Baik
23	CCTV - Camera Control Television System	2	Baik
24	Mesin Absensi	2	Baik
25	Alat Kantor Lainnya	12	Baik
26	Meja Kerja Kayu	1	Baik
27	Meja Rapat	19	Baik
28	Meja Bundar	1	Baik
29	Kasur/Spring Bed	3	Baik
30	Kursi Rapat	77	Baik
31	Kursi Tamu	10	Baik
32	Kursi Putar	12	Baik
33	Bangku Tunggu	3	Baik
34	Kursi Lipat	3	Baik
35	Sofa	5	Baik
36	Meubeleur lainnya	1	Baik
37	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
38	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
39	Mesin Cuci	1	Baik
40	Lemari Es	2	Baik
41	A.C. Window	5	Baik
42	A.C. Split	8	Baik
43	Kipas Angin	3	Baik
44	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	Baik



45	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik
46	Tabung Gas	4	Baik
47	Treng Air/Tandon Air	8	Baik
48	Televisi	3	Baik
49	Loudspeaker	3	Baik
50	Microphone	2	Baik
51	Tustel	1	Baik
52	Dispenser	2	Baik
53	Gordyin/Kray	1	Baik
54	Bracket Standing Peralatan	2	Baik
55	Alat Pembantu Kebakaran	10	Baik
56	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	24	Baik
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	Baik
58	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3	Baik
59	Meja Tamu Biasa	1	Baik
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	24	Baik
61	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	Baik
62	Audio Mixing Console	1	Baik
63	Microphone/Wireless MIC	3	Baik
64	Meja Kerja	19	Baik

Sumber : Kantor Camat Muara Muntai 2024

C.3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan adalah Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Gedung dan Bangunan kecamatan Muara Muntai dapat kami sajikan dalam table di bawah ini;

Tabel. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	JLH	KET
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	13	Baik
3	Bangunan Posyandu	1	Baik
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Baik
5	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	4	Baik
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	5	Baik
7	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	9	Bangunan Sekolah kondisi Baik



8	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1	Bangunan Gedung Bulu tangkis Kondisi Baik
9	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	1	Bangunan Perpustakaan Sekolah SD Kondisi Baik
10	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	Bangunan Ktr Kondisi Baik
11	Taman lainnya	1	Baik
12	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	1	Kurang Baik
13	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2	Baik
14	Rumah Negara Gol II Lain-lain	3	1 Unit Kurang Baik, 2 Unit Baik
15	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	2	
16	Asrama Permanen	2	1 Unit Kurang Baik, 1 Unit Baik
17	Flat/rumah Lain-lain (dst)	1	Kurang Baik

C.4. Aset Tetap Jalan dan Jembatan

Aset Jalan Dan Jembatan adalah aset yang mencakup Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.. Aset Jalan Dan Jembatan kecamatan Muara Muntai dapat kami sajikan dalam table di bawah ini;

Tabel. Aset Tetap Jalan dan Jembatan

NO	URAIAN	JLH	KET
1	2	3	4
1	Jalan Desa	1	Baik
2	Jembatan Pada Jalan Desa	1	Baik
3	Jembatan Pada Jalan Desa	1	Baik
4	Jembatan Pada Jalan Desa	1	Baik
5	Jembatan Khusus Lain-lain	1	Baik
6	Tanaman Hias	4	Rusak Berat



Secara keseluruhan Aset Tetap Kantor Camat Muara Muntai dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN ASET TETAP	JUMLAH
1	Tanah	2.228.424.540,00
2	Peralatan dan Mesin	2.704.329.307,93
3	Gedung dan Bangunan	11.542.676.149,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	685.034.600,00
5	Aset Tetap Lainnya	14.980.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	(4.505.845.391,32)
Jumlah		12.669.599.205,61

Sumber Neraca Keuangan PD Kec Muara Muntai Per 31 Des 2024

2.3. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat digambarkan, tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Muntai, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Muara Muntai dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Muara Muntai sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Muara Muntai sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan kelengkapan administrasi Kependudukan di tingkat Desa yang meliputi KK, dan KTP-e.
2. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di Desa.
4. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan Desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :

1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.



2. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
3. Pembinaan anggota Linmas se Kecamatan Muara Muntai.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "**PATEN**" merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik maka pelaksanaan **PATEN** adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan **PATEN**. Adapun jenis pelayanan terpadu di Kecamatan Muara Muntai kepada Masyarakat terdiri dari :

1. KTP Nasional (KTP SIAK);
2. Kartu Keluarga;
3. KTP Elektrik (e-KTP);
4. Pindah Datang;
5. Kartu Kuning (AK.1);
6. Rekomendasi BANSOS;
7. Rekomendasi POKMAS;
8. SKCK;



Tabel T-C. 23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Indikator Tujuan																
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	75	76	76	76	77	80,37	83,51	88,17	-	-	107,16	109,88	116,01	-	-
Indikator Sasaran																
Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75	75	76	76	77	71,43	75	76	-	-	95,24	100	100	-	-
Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	75	75	76	76	77	75	75	76	-	-	100	100	100	-	-
Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	69,7	40	40	40	40	36,36	19,52	15,03	-	-	52,17	48,8	37,58	-	-
Indikator Program, Kegiatan & Sub Kegiatan																
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	50	2	2	2	2	50	2	2	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	80	80	80	80	80	80	90	95	-	-	100	112,5	118,75	-	-
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	66,67	60,00	60,00	60,00	60,00	55,00	71,42	60	-	-	82,50	119,0	100	-	-
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Desa	Kegiatan	63	33	33	33	33	63	30	30	-	-	100	90,90909	90,90909	-	-



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	150	7	7	7	7	150	7	7	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	65	3	3	3	3	50	3	3	-	-	76,92	100	100	-	-
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55	55	-	-	100,00	100,0	100	-	-
Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Laporan	3	50	50	50	50	3	50	50	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	Persen	71,42	71,42	71,42	71,42	71,42	70,00	70	45	-	-	98,01	98,0	63,00756	-	-
Jumlah Desa Yang difasilitasi		21	11	11	11	11	21	11	11	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	21	11	11	11	11	21	11	11	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	15	11	11	11	11	2	0	0	-	-	13,33	0	0	-	-
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0	72,99	-	-	0,00	0,0	108,9403	-	-
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	21	11	11	11	11	11	11	11	-	-	52	100	100	-	-
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	3	3	3	3	3	3	-	-	150	100	100	-	-
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	-	-

Kukar Idaman Terbaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani 38
bangsa



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	45	40	40	40	40	45	40	40	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	575	575	575	575	575	575	575	575	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	575	1	1	1	1	575	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	575	1	1	1	1	575	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	575	1	1	1	1	575	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	12	12	12	12	13	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	62	40	40	40	40	28	40	40	-	-	45	100	100	-	-
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	62	1	1	1	1	62	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Laporan	5	5	5	5	5	3	5	5	-	-	60	100	100	-	-
Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Layanan	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	75	1	1	1	1	0	1	1	-	-	0	100	100	-	-

Kukar Idaman Terbaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani 39
bangsa



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	3	3	3	3	30	3	3	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	1	5	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	1	1	1	1	24	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	56000	1	1	1	1	50000	1	1	-	-	89,29	100	100	-	-
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Paket	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	30	30	30	30	36	40	38	-	-	120	133,3	126,7	-	-
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	16	100	100	100	100	16	100	100	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	18	18	18	18	18	1	3	0	-	-	6	16,66667	0	-	-
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	2	2	2	2	0	2	0	-	-	0	100	0	-	-
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	0	-	-	100	100	0	-	-
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5	5	5	5	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	5	5	5	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	10	10	10	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1000	1	1	1	1	1000	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	168	12	12	12	12	168	12	12	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	684	12	12	12	12	684	12	12	-	-	100	100	100	-	-

Kukar Idaman Terbaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani 40
bangsa



Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	Unit	566	509	509	509	509	566	509	509	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	3	3	3	1	1	2	-	-	100	100	66,67	-	-
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	6	6	6	6	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	25	25	25	25	25	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-



Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai dan untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan tidak terealisasi dikarenakan pemungutan retribusi yang ada di Kecamatan sudah dipindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- merupakan hasil kerjasama Tim seluruh aparatur di lingkup Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Muara Muntai menghadapi perubahan yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peningkatan kebutuhan infrastruktur, pertumbuhan populasi, serta tekanan pada sumber daya alam menjadi perhatian utama dalam penyusunan rencana strategis ini. Pendekatan yang holistik dan berbasis data diperlukan untuk menjamin pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.



Tabel. T-C. 24
ANGGARAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MUARA MUNTAI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Indikator Program, Kegiatan & Sub Kegiatan																	
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	345.380.000	573.378.000	-	-	0	172,7	286,69	-	-	460.055.600	50
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	1.850.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	15352247254	35.681.765.089	11.985.762.166	-	-	829,851	5097,4	1712,25	-	-	53.431.164.776	85
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1.850.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	15.352.247.254	36.027.145.089	12.559.140.166	-	-	830	4003,0	1395,46	-	-	53.891.220.376	84
Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		345.380.000	573.378.000	-	-	0	172,7	286,69	-	-	460.055.600	50
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.850.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	15.352.247.254	35.681.765.089	11.985.762.166	-	-	830	5097,4	1712,25	-	-	53.431.164.776	85
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Yang Aktif	316.954.636	148.328.881	148.328.881	148.328.881	148.328.881	320929800	4.019.215.250	346.829.800	-	-	101,254	2709,7	233,82	-	-	4.409.511.010	94
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan Desa	316.954.636	148.328.881	148.328.881	148.328.881	148.328.881	320.929.800	4.019.215.250	346.829.800	-	-	101	2709,7	233,82	-	-	4.409.511.010	94



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.103.800	23.549.500	27.388.500	-	-	80,69	235,50	273,89	-	-	41.131.000	65
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	301.954.636	138.328.881	138.328.881	138.328.881	138.328.881	308.826.000	3.995.665.750	319.441.300	-	-	102,28	2889	230,93	-	-	4.368.380.010	94
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	116.125.755	116.125.755	116.125.755	116.125.755	0	196.134.000	157.039.600	-	-	0	168,9	135,23	-	-	227.541.920	64
Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	-	116.125.755	116.125.755	116.125.755	116.125.755	0	196.134.000	157.039.600	-	-	0	168,9	135,23	-	-	227.541.920	64
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		113.625.755	113.625.755	113.625.755	113.625.755	0	196.134.000	157.039.600	-	-	0	172,6	138,21	-	-	227.541.920	64
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0		0	-	-	0	0	0,00	-	-	-	0
Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	5.000.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	3540000	-	-	-	-	70,8	0,0	0,00	-	-	3.540.000	100
Jumlah Desa Yang difasilitasi	5.000.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	3.540.000	0	0	-	-	71	0	0	-	-	3.540.000	100
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0

Kukar Idaman Terbaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani
bangsa 44



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Pendayagunaan Aset Desa																	
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000 0	2.500.000 0	3.540.000 0	0	0	-	-	71	0	0	-	-	3.540.000	100
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.769.713.328	4.733.863.328	4.733.863.328	4.733.863.328	4.767.521.493	6874330491	8.569.075.133	5.583.729.312	-	-	88,476	181,0	117,95	-	-	16.560.151.486	79
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.970.705	25.967.377	25.967.377	25.967.377	25.967.377	15.408.000	1.540.000	3.590.000	-	-	140	6	14	-	-	17.666.000	86
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.450.000	0	2.820.000	-	-	0	0	14	-	-	5.014.000	69
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.970.705	5.967.377	5.967.377	5.967.377	5.967.377	10.958.000	1.540.000	770.000	-	-	100	26	13	-	-	12.652.000	95
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5.368.707.710	3.370.707.710	3.370.707.710	3.370.707.710	3.370.707.710	4.336.390.750	5.228.849.998	3.871.037.467	-	-	81	155	115	-	-	10.339.448.241	77
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.362.707.710	3.362.707.710	3.362.707.710	3.362.707.710	3.362.707.710	4.332.970.750	5.196.749.998	3.791.717.467	-	-	81	155	113	-	-	10.288.064.241	77
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000 0	3.000.000 0	3.420.000 0	0	0	-	-	57	0	0	-	-	3.420.000	100

Kukar Idaman Terbaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa 45



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	32.100.000	79.320.000	-	-	0	642	1586	-	-	47.964.000	43
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	47.278.712	27.278.712	27.278.712	27.278.712	27.278.712	14.400.000	19.790.000	120.340.000	-	-	30	73	441	-	-	58.258.000	38
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				7.000.000			0	99.780.000	-	-	0	0	0	-	-	19.956.000	20
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	47.278.712	27.278.712	27.278.712	20.278.712	27.278.712	14.400.000	19.790.000	20.560.000	-	-	30	73	75	-	-	38.302.000	70
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	50.000.000	-	-	0	0	156	-	-	10.000.000	20
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	50.000.000	-	-	0	0	156	-	-	10.000.000	20
Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	475.000.000	240.500.000	240.500.000	240.500.000	240.500.000	291.065.750	525.943.175	553.151.499	-	-	61	219	230	-	-	927.639.225	68

Kukar Idaman Terbaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
#melayani
bangsa 46



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	2.000.000	2.000.000	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.000.000	25.000.000	25.000.000	23.000.000	23.000.000	52.847.100	186.850.000	-	-	106	0	747	-	-	90.217.100	38
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	13.205.000	-	-	0	0	126	-	-	2.641.000	20
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	62.956.000	-	-	53	315	140	-	-	108.539.100	83
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	35.000.000	37.475.500	-	-	70	150	125	-	-	78.726.500	76
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	124.968.050	355.161.675	-	-	50	284	200	-	-	530.014.925	73
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	38.250.600	70.350.000	-	-	77	281	178	-	-	117.500.600	77
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	280.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	976.643.429	1.367.379.325	0	-	-	349	1367	0	-	2.344.022.754	100
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	180.000.000	100.000.000	-	-	-	167.031.129	1.171.799.999	0	-	-	93	1172	0	-	1.338.831.128	100
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	180.000.000	-	100.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0

Kukar Idaman Terbaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa 47



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100.000.000	200.000.000	-	-	-	809.612.300	195.579.326	0	-	-	810	98	0	-	-	1.005.191.626	100
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	20.000.000	20.000.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	80.000.000	80.000.000	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	1.310.251.364	759.251.364	759.251.364	759.251.364	759.251.364	1.099.181.447	1.142.913.353	897.814.846	-	-	84	151	118	-	-	2.421.657.769	77
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	100	150	150	-	-	6.600.000	73
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	702.560.000	402.560.000	402.560.000	402.560.000	402.560.000	617.906.241	602.060.032	510.916.111	-	-	88	150	127	-	-	1.322.149.495	76
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	604.691.364	354.691.364	354.691.364	354.691.364	354.691.364	478.275.206	537.853.321	383.898.735	-	-	79	152	108	-	-	1.092.908.274	78
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	277.504.837	178.158.165	178.158.165	178.158.165	211.816.330	141.241.115	282.659.282	87.795.500	-	-	51	159	49	-	-	441.459.497	86
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.060.800	0	0	-	-	105	0	0	-	-	4.060.800	100
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	273.654.837	173.658.165	173.658.165	103.658.165	103.658.165	137.180.315	282.659.282	87.795.500	-	-	50	163	51	-	-	437.398.697	86

Kukar Idaman Terbaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa 48



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	2.500.000	2.500.000	-	-	0	0		-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	70.000.000	103.658.165	0	0		-	-	0	0	0	-	-	-	0
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	2.500.000	2.500.000	0	0		-	-	0	0	0	-	-	-	0



Adapun Sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Muara Muntai adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada tiga program utama Kecamatan Muara Muntai dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 100%.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2021 s/d 2026 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 80%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Muara Muntai sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target;
- Kerjasama tim pengelola anggaran yang memadai baik Pengguna Anggaran, Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Muara Muntai.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran di beberapa Sub Kegiatan dan tidak bisa 100% seperti seperti penyediaan jasa komunikasi dan Listrik, Belanja Gaji dan Tunjangan dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.

2.4. Kelompok sasaran layanan



Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Muara Muntai yaitu:

- Penduduk kecamatan: Semua individu yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah kecamatan.
- Perangkat daerah: Aparatur pemerintah kecamatan dan / Desa
- Organisasi kemasyarakatan: Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, PKK, dan lain-lain.
- Dunia usaha: Pelaku bisnis dan industri kecil di kecamatan.
- Kelompok rentan: Termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
- Pihak lain yang membutuhkan pelayanan: Institusi pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Muara Muntai dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Muara Muntai maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan antara lain:

- Polsek Muara Muntai, untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- Koramil Muara Muntai, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- Kantor Urusan Agama, untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- Puskesmas Muara Muntai, untuk melakukan pelaksanaan koordinasi fasilitasi penurunan stunting, posyandu dikecamatan dan pelayanan dasar Kesehatan untuk masyarakat
- Satpol PP, dalam hal Penegakan Perda dan ketertiban umum di wilayah Muara Muntai, dan Patroli gabungan pengawasan penyakit



masyarakat, razia minuman keras, serta penanganan gelandangan/pengemis

- Kesbangpol, untuk memberikan fasilitasi perizinan penelitian, rekomendasi kegiatan masyarakat, serta menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- Damkar, untuk menyediakan layanan pencegahan, pemadaman kebakaran, serta penanganan keadaan darurat lainnya di wilayah Kecamatan.
- BPBD, untuk memberikan layanan penanggulangan bencana alam maupun non-alam, termasuk kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana di wilayah Kecamatan.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan, untuk memberikan layanan pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi bantuan bagi petani/kelompok tani serta mendukung pengembangan usaha pertanian dan perkebunan masyarakat Kecamatan.
- DP3A, untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kecamatan.
- Perkim, untuk memberikan layanan pendataan dan fasilitasi bantuan rumah layak huni serta penataan kawasan permukiman masyarakat Kecamatan.
- DLHK, untuk memberikan layanan kebersihan, pengelolaan sampah, penataan ruang terbuka hijau, serta pelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan.
- Bappeda, untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Muara Muntai berjalan dengan baik dan terarah.
- DPMD, untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan



pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan POSYANTEK Antar Desa di wilayah Kecamatan.

- Disdukcapil, mitra kerja dalam hal layanan penerbitan KTP dan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan, meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Muara Muntai.
- Inspektorat, untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- Bapenda, mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2;
- Dinas Sosial, mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.6. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota memiliki tugas dalam koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala



yang perlu diidentifikasi dan dijadikan dasar perumusan tujuan, sasaran, serta strategi ke depan

2.6.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Kota Bangun saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Muntai maka dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan kecamatan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah:

Tabel. Pemetaan Permasalahan Kecamatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan Kota Bangun	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Lemahnya integritas dan profesionalisme aparatur Sarana dan Prasarana Ruang dan gedung kantor tempat Pelayanan Publik belum memadai Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan Tidak optimalnya penerapan SOP Pelayanan



			Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak
		Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)
			Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.
			Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
			Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan dan sapras Umum di kecamatan
			Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
		Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait



			Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
			Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan
			Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
			Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
			Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis
			Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll
		Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola pendapatan asli desa
			Masih terbatasnya pembinaan terhadap aparatur desa
			Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
		Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda.
			Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.



			Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
			Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
			Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar PD
			Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Sumber: hasil analisis, 2025

2.6.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) adalah memperhatikan isu – isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan



menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah Kecamatan Muara Muntai dihadapkan pada tuntutan untuk lebih responsif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika perubahan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pendekatan perencanaan pembangunan harus senantiasa mempertimbangkan isu-isu dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat pada masa yang akan datang, guna memastikan bahwa arah pelaksanaan pembangunan sungguh-sungguh mengarah pada target yang tepat. Karena itu, perlunya perencanaan yang cermat dan komprehensif, sehingga orientasi pembangunan dapat selaras dengan tujuan pengembangan wilayah.

Adapun Permasalahan permasalahan pelayanan yang bersifat makro bagi Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Muara Muntai

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kewenangan Kecamatan dalam urusan administrasi umum dan pelayanan dasar	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP	Data curah hujan tahunan dari BMKG didominasi oleh curah hujan < 2.200 mm/tahun termasuk Kota Bangun	Transformasi digital pelayanan publik	Implementasi SPBE, OSS, penyederhanaan birokrasi	Integrasi layanan kecamatan di Kaltim	Optimalisasi PATEN & digitalisasi layanan desa-kecamatan	Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital dan SDM aparatur



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Potensi Pertanian dan Perkebunan	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Pencadangan Kawasan Perairan Habitat Pesut Mahakam di Kecamatan Kota Bangun	Ketahanan pangan & adaptasi perubahan iklim	Food estate & kedaulatan pangan	Pengembangan pertanian terpadu Kaltim	Optimalisasi pertanian lahan rawa & pesisir	Peningkatan efektivitas program pertanian sesuai kewenangan kecamatan
Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial kelompok rentan	Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, banjir	Perubahan iklim berdampak ke ekonomi lokal	Penguatan UMKM & perlindungan sosial	Pengembangan sentra IKM Kaltim	Penguatan koperasi & UMKM lokal	Peningkatan kapasitas IKM & penguatan perlindungan sosial
Potensi Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pengelolaan PAD Desa	Kurangnya daya dukung & daya tampung penyediaan air bersih	SDGs pembangunan manusia berkelanjutan	Peningkatan kualitas SDM & literasi digital	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja Kaltim	Pemberdayaan masyarakat desa & peningkatan PAD	Optimalisasi SDM desa & peningkatan kapasitas aparatur desa
Pengembangan pariwisata berbasis alam, ekowisata, dan wisata budaya	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	-	Tren ekowisata berkelanjutan	Penguatan destinasi pariwisata prioritas	Kawasan pariwisata Kaltim	Wisata budaya & alam lokal	Pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan	-	-	Ancaman krisis pangan dunia	Diversifikasi pangan	Pangan lokal Kaltim	Pengembangan lumbung pangan desa	Penguatan ketahanan pangan berbasis desa
Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung	-	-	Transisi energi hijau	Program EBT (Energi Baru Terbarukan)	Potensi energi surya Kaltim	Pemanfaatan energi terbarukan	Pengembangan energi bersih untuk mendukung layanan publik
Kawasan Peruntukan Industri	-	-	Kompetisi industri global	Hilirisasi industri & nilai tambah SDA	Kawasan industri Kaltim	Kawasan industri berbasis SDA lokal	Optimalisasi pengembangan kawasan industri berkelanjutan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

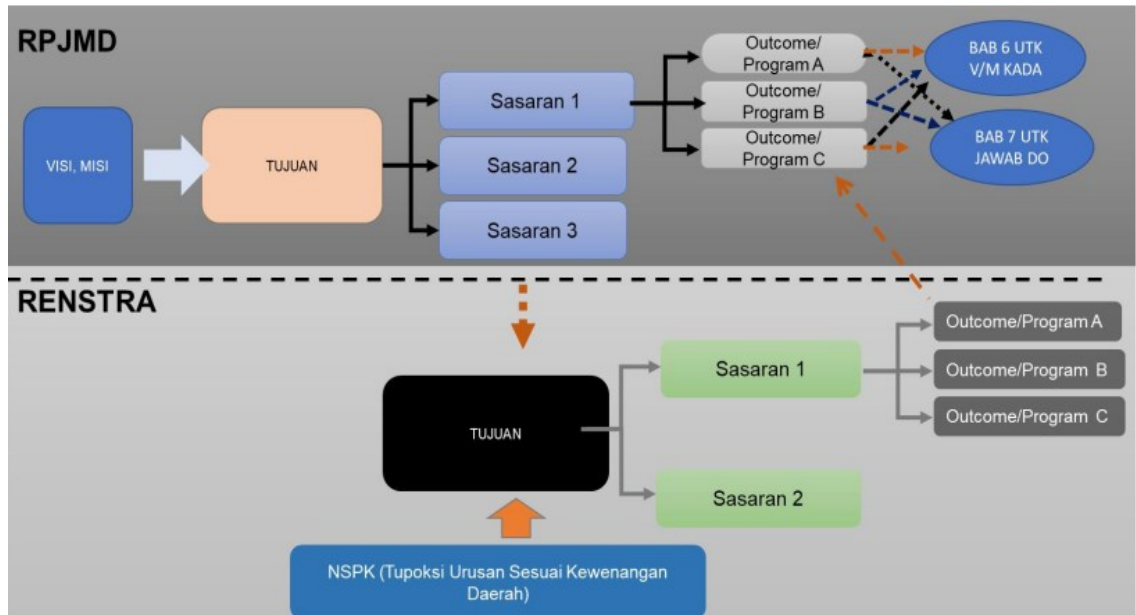


Kecamatan Muara Muntai menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu ***"Meningkatnya kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan"***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu: ***"Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara"***. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Muntai, dalam hal ini Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai.

Sasaran Renstra Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Muara Muntai menetapkan sasaran strategi ***"Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan"***. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Muntai tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Muara Muntai 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Muara Muntai yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel di bawah ini :



Tabel. T-C 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kec Muara Muntai

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	N/A	2,76 (C)	3,12 (B-)	3,43 (B-)	3,58 (B)	3,78 (B)	3,92 (B)
	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	92,00	93,4	95,00	96,00	98,00	100	100

3.2. Strategi Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Muntai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada table Tabel 3.3.1

Tabel 3.3.1 Tabel Strategi Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan		



	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Muntai. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan	Akselerasi Pembangunan SDM dan Peningkatan Efektivitas Perlindungan Sosial	Pengembangan Ekonomi Sektor Unggulan Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata	Pemantapan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pendapatan Masyarakat Berkualitas	Perwujudan Kukar yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kecamatan Muara Muntai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah dengan kondisi gambaran Umum dan Georafis yang berbeda disetiap Desa serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula maka wilayah Kecamatan Muara Muntai memiliki potensi yang sangat beragam.

Kecamatan Muara Muntai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki beberapa kelemahan faktor eksternal serta faktor internal di dalam kelancaran proses pencapaian tujuan yang akan menjadi isu-isu penting dalam menjalankan Visi dan Misinya sebagai pengemban wewenang Bupati Kutai kartanegara yang dilaksanakan oleh Camat Muara Muntai selain itu juga tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Muara Muntai masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan ke depan, terkait dengan beberapa permasalahan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai



dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Muara Muntai sebagai berikut :

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Muara Muntai

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa
			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	

Sumber : hasil analisis 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan Perubahan Rencana strategis Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025 – 2029 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1. Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Muara Muntai ditentukanlah program, dan kegiatan. Visi dan Misi merupakan komponen strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah juga menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Visi dan misi adalah fondasi utama bagi perangkat daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan. Keduanya memastikan perangkat daerah berjalan dengan arah yang jelas, selaras dengan tujuan pembangunan daerah, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. sangat relevan dengan kinerja perangkat daerah Kecamatan Kota Bangun karena mencakup Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengembangan Potensi Lokal



Untuk mencapai visi misi ini, diperlukan kinerja pelayanan yang maksimal. Namun, berbagai faktor pendorong dan penghambat dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan yaitu dukungan Infrastruktur dan Teknologi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Partisipasi Masyarakat, Ketersediaan Anggaran yang Memadai, dan Komitmen Pemerintah Daerah dan faktor yang menghambat seperti Keterbatasan Infrastruktur, Sebagian aparatur belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelayanan berbasis teknologi, Rendahnya pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi terpadu, Tumpang tindih kewenangan antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya sering kali memperlambat pelaksanaan program

Program yang relevan dengan Kecamatan Muara Muntai sebagaimana tercantum dalam rancangan RPJMD Kukar 2025-2029 berkenaan dengan Pengembangan Destinasi Wisata Potensial, Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, serta infrastruktur transportasi lainnya, Mendorong program pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan . Meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelayanan publik di kecamatan melalui implementasi teknologi digital dan e-government, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Untuk mencapai visi misi ini Kecamatan Muara Muntai menentukan program, dan kegiatan sebagai berikut :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.



- b. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum serta memberikan pelayanan administrasi dan kebutuhan dasar kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan local yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan maupun stakeholder melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal.
- d. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** di tingkat kecamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam rangka menjamin kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif melalui upaya koordinatif lintas sektor serta pelibatan aktif aparat dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- e. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** di Kecamatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh camat sebagai perpanjangan tangan bupati/wali kota dalam mengoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, mencakup pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta penanganan konflik sosial dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- f. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh camat selaku perangkat daerah kabupaten/kota untuk membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4.2. Kegiatan

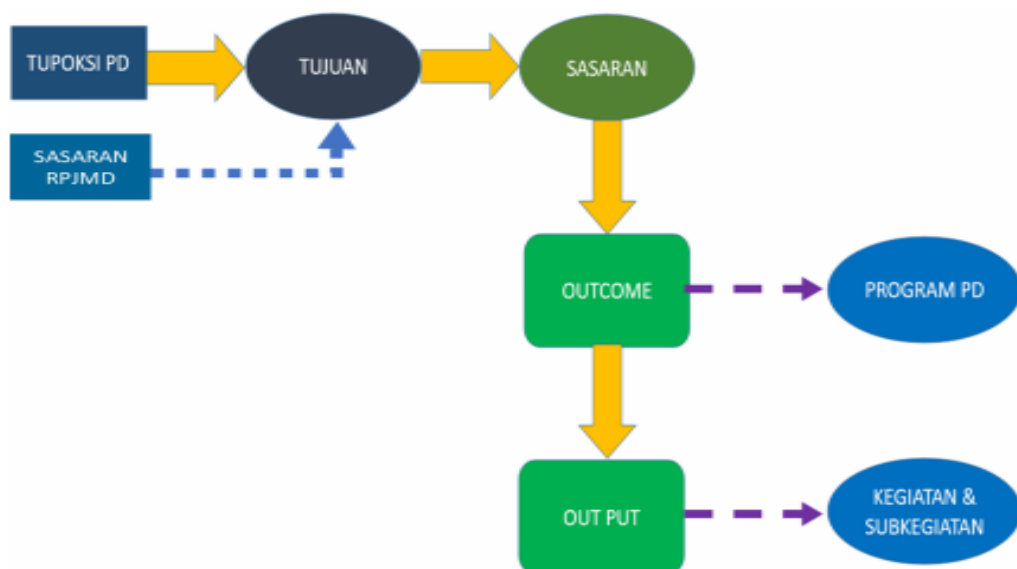
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Muara Muntai adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
15. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

16. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
18. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Muntai merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Muntai serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Muntai dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah





Tabel 4.2.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan				Indeks Pelayanan Publik		
Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan			Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP		
					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik		
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;			Tercapainya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Program
				Tokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No.4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pedum terkait pehitungan di Permen PAN RB					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

No. 5 Tahun 2023;				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
			<i>Terselesikanya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i>	<i>Administrasi Keuangan Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan
			<i>Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>
				Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
			<i>Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kegiatan</i>



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan
			Terselesaikan-nya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan
			Tersedianya barang milik daerah untuk mendukung operasional pemerintahan	Tersedianya barang milik daerah untuk mendukung operasional pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Pengadaan Kendaraan Dinas	Sub Kegiatan



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

				Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
		Terpenuhi ya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah an	Terpenuhi ya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah an	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
			Terpelihara nya barang milik daerah yang digunakan perangkat daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program
				Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan		
					kewenangan pada kecamatan		
				Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Sub Kegiatan



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

				dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan
			Terlaksann ya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanak an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
			Terlaksana nnya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenanga n Camat	Jumla kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan
		Meningkatn ya kemandirian , partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keluraha n Yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

			Terselenggara nya koordinasi kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Kegiatan
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
			Terlaksana nya pemberdaya an lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan	Kegiatan
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggara an Lembaga Kemasyarakan	Sub Kegiatan
		Terpelihara nya ketentrama n dan ketertiban umum di kecamatan		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Program
			Terlaksana nya kegiatan penyelengga raan ketenterama n dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Kegiatan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan
		Meningkatn ya kualitas Penyelengga raan Urusan Pemerintah an Umum		Cakupan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Program



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

				Terlaksana nya kegiatan Urusan Pemerintah an Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggara an urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan
			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa		Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Sub Kegiatan
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sub Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sub Kegiatan



Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.2.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Persen	100	1,324,718,000	100	1,470,978,000	100	1,455,978,000	100	1,455,978,000	100	1,455,978,000	100	1,455,978,000	
	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	N/A	N/A	21,607,048,300	8	12,008,000,000	0,347222	10,110,922,318	0,361111	11,671,484,711	0,375	14,850,239,468	0,375	17,372,674,450	
Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	2 kegiatan	2	309,641,500	2	350,000,000	2	460,000,000	2	460,000,000	2	460,000,000	2	460,000,000	
Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaadan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	2	75,302,500	3	150,000,000	3	210,000,000	3	210,000,000	3	210,000,000	3	210,000,000	



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1	234,339,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	42,505,000	1	75,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12	42,505,000	12	75,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2	22,579,619,800	2	13,053,978,000	2	10,956,900,318	2	12,517,462,711	2	15,696,217,468	2	18,218,652,450	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	4	972,571,500	3	1,045,978,000	3	845,978,000	3	845,978,000	3	845,978,000	3	845,978,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80 Laporan	80	21,607,048,300	80	12,008,000,000	80	10,110,922,318	80	11,671,484,711	80	14,850,239,468	80	17,372,674,450	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	70 Persentase	70	537,533,700	70,5	436,000,000	71	18,275,000,000	71,5	18,275,000,000	72	18,275,000,000	72,5	18,275,000,000	



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Kali	8	132,203,200	8	100,000,000	8	17,950,000,000	8	17,950,000,000	8	17,950,000,000	8	17,950,000,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	6	108,059,200	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2	24,144,000	2	50,000,000	2	17,900,000,000	2	17,900,000,000	2	17,900,000,000	2	17,900,000,000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Kegiatan	2	405,330,500	2	336,000,000	2	325,000,000	2	325,000,000	2	325,000,000	2	325,000,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga	5	405,330,500	5	336,000,000	5	325,000,000	5	325,000,000	5	325,000,000	5	325,000,000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	75 Persen	75	45,252,550	75	175,000,000	75	375,000,000	75	375,000,000	75	375,000,000	75	375,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	2	45,252,550	2	175,000,000	2	375,000,000	2	375,000,000	2	375,000,000	2	375,000,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2		2	50,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

instansi vertikal di wilayah kecamatan															
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2	45,252,550	4	125,000,000	4	125,000,000	4	125,000,000	4	125,000,000	4	125,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68 Persen	68	175,398,000	68	195,000,000	69	270,000,000	69	270,000,000	70	270,000,000	70	270,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	2 Kegiatan	2	175,398,000	2	195,000,000	2	270,000,000	2	270,000,000	2	270,000,000	2	270,000,000	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50	175,398,000	50	180,000,000	50	255,000,000	50	255,000,000	50	255,000,000	50	255,000,000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2	-	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	80 Persen	80	5,000,000	81	80,000,000	81	80,000,000	82	80,000,000	82	80,000,000	83	80,000,000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	11 Desa	11	5,000,000	11	80,000,000	11	80,000,000	11	80,000,000	11	80,000,000	11	80,000,000	

Kukar Idaman Terbaik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Pengawasan Pemerintahan Desa															
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000	11	5,000,000	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	42		2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69 Poin	69	6,927,881,197	69	6,402,333,553.00	69,5	6,955,917,317.00	69,5	6,855,917,317.00	70	6,855,917,317.00	70	6,855,917,317.00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104 Dokumen	104	237,115,150	103	325,000,000	103	235,000,000	103	235,000,000	103	235,000,000	103	235,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3	56,100,000	3	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	43 Dokumen	30	2,500,000	30	-	30	5,000,000	30	5,000,000	30	5,000,000	30	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5	2,500,000	5	-	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	4 Laporan	4	24,316,950	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	20,370,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data	100	125,328,200	100	250,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1	6,000,000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	15	4,551,790,548	15	4,526,041,725	15	4,526,041,725	15	4,526,041,725	15	4,526,041,725	15	4,526,041,725
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53	4,454,681,908	53	4,436,041,725	53	4,436,041,725	53	4,436,041,725	53	4,436,041,725	53	4,436,041,725
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1	7,108,640	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	575 Unit	575	129,642,862	575	102,278,712	575	150,000,000	575	150,000,000	575	150,000,000	575	150,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	11,900,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	48,739,150	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1	21,725,000	1	0	1	0	1	0	1	-	1	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12	47,278,712	12	47,278,712	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	24 Orang	24	-	24	-	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	25	50,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5	-	5	-	5	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	8 Layanan	8	218,666,360	8	197,474,160	8	353,000,000	8	353,000,000	8	353,000,000	8	353,000,000	



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	-	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2	67,966,000	2	700	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2	10,500,000	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	20,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2	13,774,160	2	13,774,160	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12	5,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30	90,926,200	12	75,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	30	175,000,000	30	175,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100	10,500,000	100	20,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	18 Unit	18	507,000,000	18	-	18	100,000,000	18	-	18	-	18	-	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1	-	4	-	4	-	4	-	3	-	3		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1		



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20	-	2	-	20	-	20	-	20	-	20		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1	507,000,000	2	-	2	-	2	-	2	-	2		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	-	3	-	3	100,000,000	3	-	3	-	3		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12	932,508,112	12	1,027,788,956	12	935,625,592	12	935,625,592	12	935,625,592	12	935,625,592	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1	2,000,000	1	2,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	654,729,358	12	671,097,592	12	671,097,592	12	671,097,592	12	671,097,592	12	671,097,592	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	275,778,754	12	354,691,364	12	261,528,000	12	261,528,000	12	261,528,000	12	261,528,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	566 Unit	566	351,158,165	566	223,750,000	566	606,250,000	566	606,250,000	566	606,250,000	566	606,250,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3	50,000,000	3	51,250,000	3	51,250,000	3	51,250,000	3	51,250,000	3	51,250,000	



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4	173,658,165	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	4	7,500,000	1	2,500,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	2	120,000,000	2	70,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 Unit	1	-	2		10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000



Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program RT Ku-Terbaik	Penyaluran Program RT di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
2	Program Pelayanan Publik Cerdas	Mini Mall Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan

**4.3. Indikator Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Muntai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Bangun

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	N/A	2.73 (C)	3.12 (B-)	3.45 (B-)	3.58 (B)	3.76 (B)	3.91 (B)	Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No.4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pedum terkait pehitungan di Permen PAN RB No. 5 Tahun 2023



BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025–2029 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana strategis Perubahan ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2025. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kecamatan Muara Muntai Tahun 2025-2029 Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana strategis Perubahan ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Muara Muntai.

Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Muara Muntai. Dengan demikian, setelah Rencana strategis ini ditetapkan,



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUARA MUNTAI 2025 - 2029

Kecamatan Muara Muntai telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Muara Muntai, 21 Oktober 2025

Camat Muara Muntai,

MULYADI, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IV b

NIP.19700205 200012 1 003